

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS
PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SOLOK**

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

ULUL AZMI FADILAH
1510012111076

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 26/Skipsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : **ULUL AZMI FADILAH**
Nomor : **1510012111076**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota Oleh Dinas
Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019
Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Solok**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**

(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

(Dr.Desmal Fajri S.Ag.,M.H.)

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS
PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SOLOK**

Ulul Azmi Fadilah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹,

Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ululazmifadilah08@gmail.com

ABSTRACT

City transportation as part of the urban transportation system is one of the basic needs of the city community and is an inseparable part of city life in general, the existence of urban transportation is very much needed but if it is not handled properly and correctly it will become a problem for city life. in this study: 1). How is the procedure for granting route permits by the Department of Transportation to City Transportation based on Regional Regulation Number 28 of 2019 regarding changes in the route permit retribution tariff in Solok Regency. 2). What are the obstacles faced in the process of granting city transportation route permits in Solok Regency. 3). To analyze the efforts made by the Transportation Service of Solok Regency in overcoming the number of city transportation routes that do not have route permits. The type of research is Sociological Law. Data Collection Techniques, Document Studies, Interviews, and Data Analysis. The results of the research are: 1). Procedure for Granting Route Permits by the Department of Transportation for City Transportation in Solok Regency. 2). Obstacles in the process of granting City transportation route permits by the Transportation Service of Solok Regency. 3). Efforts made by the Solok Regency Transportation Service in Overcoming Obstacles in granting City transportation route permits.

Keywords: City Transportation, Permit, Solok Regency Transportation Service

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.¹ Angkutan umum bagi warga kabupaten Solok merupakan sarana transportasi vital yang di butuhkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan, baik bekerja, sekolah, berbelanja dan lain sebagainya tidak bisa terlepas dari angkutan umum, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum.

Selanjutnya dapat juga diketahui bahwa ada beberapa kegiatan pembinaan oleh sub dinas angkutan darat pada seluruh supir maupun perusahaan guna peningkatan layanan pada masyarakat antara lain :

1. Memberikan bimbingan teknis pada seluruh supir angkutan umum yang ada di Kabupaten Solok
2. Memeriksa kelengkapan bagi pengemudi angkutan umum seperti SIM dan STNK serta surat lainnya
3. Memberikan pengarahan mengenai rambu-rambu lalu lintas Kabupaten Solok

Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dinas perhubungan melakukan penertiban izin trayek dengan memeriksa izin trayek setiap tiga bulan sekali agar terpenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Bupati Nomor. 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi izin trayek Di Kabupaten Solok

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Sektor Transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak di perlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi:

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN SOLOK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Izin Trayek Oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan Kota berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Solok?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian izin trayek angkutan Kota di Kabupaten Solok?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mengatasi banyaknya trayek angkutan Kota yang tidak memiliki izin Trayek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa prosedur pemberian izin trayek oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan kota berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Solok.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi dalam proses pemberian izin trayek angkutan kota di Kabupaten Solok.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang di lakukakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mengatasi banyaknya trayek angkutan kota yang tidak memiliki izin trayek.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi

dokumentasi, wawancara, dan dianalisis dengan analisi kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Izin Trayek oleh Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota.

Setiap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha harus memiliki izin usaha, begitu juga izin usaha untuk angkutan kota. Pemberian izin bertujuan untuk pembinaan, pengendalian peraturan dan pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan kota. Berikut beberapa prosedur pemberian izin trayek:

1. Pemohon
2. Penerimaan Berkas
3. Verifikasi Berkas
4. Pencetakan Izin
5. Penandatanganan Izin

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Kendala yang terjadi di dalam pemberian izin trayek dan setelah izin trayek itu di berikan kepada para pengusaha :

1. Timbulnya kendala yang dihadapi pengusaha angkutan dalam melengkapi izin trayek dalam hal ini penyediaan tempat pemeliharaan kendaraan, karena bagi pemilik yang tidak mempunyai tempat pemeliharaan harus bekerja sama dengan pengusaha yang memiliki tempat pemeliharaan
2. Tempat penyimpanan angkutan yang terjadi di lapangan tidak di tempatkan pada pool tempat mereka terdaftar tetapi penyimpanan armada disimpan pada rumah penanggung jawab atau pemilik kendaraan tersebut
3. Terdapat banyaknya sopir angkutan kota yang tidak melengkapi persyaratan untuk menjadi sopir angkutan umum dan juga tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku
4. Adanya pelanggaran terhadap penyimpangan lintasan trayek karena faktor kurangnya penumpang pada lintasan jalur yang seharusnya

C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok Dalam Mengatasi Kendala Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota.

1. Dengan adanya aparat di lapangan dapat melihat langsung guna bisa melakukan tindakan penertiban terhadap para sopir yang tidak mentaati aturan yang berlaku, jika masih ada yang tidak mentaati peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi untuk membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran
Jika keadaan ini tidak secepatnya di atasi akan menimbulkan permasalahan permasalahan di kemudian harinya, yang akan menimbulkan kerugian masyarakat umum
2. Jika ada pengusaha usaha angkutan umum yang izinnya telah di cabut karena pelanggaran-pelanggaran yang diperbuatnya maka sebaiknya ketika pengusaha ini melakukan permohonan pembuatan izin usaha harus di tambah syaratnya dengan surat perjanjian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pemberian izin trayek angkutan kota harus memenuhi beberapa tahapan agar dapat beroperasi di jalan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin trayek yaitu syarat administrasi antara lain memiliki surat izin usaha angkutan dan memiliki atau menguasai kendaraan yang layak jalan dibuktikan dengan surat tanda motor dan buku uji atau foto copynya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian izin trayek angkutan kota ini tidaklah terlalu sulit, akan tetapi terdapat keluhan dari salah satu perusahaan angkutan kota yaitu lambannya kinerja pejabat Dinas Perhubungan dalam pengurusan izin dan lamanya jangka waktu pengurusan izin tersebut
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja dalam pengurusan izin dan lebih meningkatkan serta mempercepat jangka waktu dalam pengurusan izin trayek agar tidak adanya keluhan lagi pada pengusaha angkutan kota dan membentakan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap perilaku menyimpang yang tidak mengutamakan kenyamanan bagi para penumpang dengan memberikan teguran yang lebih tegas terhadap itu.

B. Saran

1. Agar angkutan kota lebih tertata dengan baik mencari alternatif dengan membuat terminal yang terletak di pusat kota agar angkutan kota

bisa tertata dengan baik dan teratur sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.

2. Agar tidak banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sopir di jalan maka penulis ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat peraturan atau keputusan mengenai tata umum tentang angkutan kota di jalanan agar terciptanya kenyamanan dan keamanan di jalan raya
3. Sehubungan dengan kurangnya literatur yang berhubungan dengan hukum perizinan terutama izin trayek pada angkutan umum dan bidang kendaraan lainnya maka diharapkan kepada para ahli serta penulis bidang hukum untuk menyusun buku-buku mengenai bidang ini terutama masalah perizinan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika
Sjachran basah. 2000. *Pengantar Hukum Perizinan*, Jakarta: Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi

C. Sumber Lain

- <https://id.m.wikipedia.org.id>
<https://kemenperin.go.id>

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam Penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.